

PERAN SOSIAL MEDIA DALAM MOBILISASI AKSI PROTES REFORMASI DIKORUPSI

Andika Nur Perkasa^{1*}

¹Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

*Corresponding author: andika.nur21@ui.ac.id

Abstract *The role of social media in the series of protests under the hashtag #ReformasiDikorupsi has attracted the attention of many social movement researchers. The role of social media became increasingly crucial, especially as the COVID-19 pandemic began to spread in Indonesia, leading the Indonesian government to impose regulations limiting direct mass gatherings. Several studies focusing on this protest movement highlight the significant role of social media in disseminating narratives, discourse, and its relation to democracy in general. However, little attention has been given to the specific types of content that played a key role in influencing the public's decision to engage in the protests. Using a life history approach with individuals who had never previously participated in protests, this paper demonstrates that the types of content found on social media can affect the decision to participate in protests. The main argument of this article is that social media can act as a catalyst for mobilizing mass movements in the #ReformasiDikorupsi protests by providing clear guidance through the posts shared with the public. Nevertheless, it is important to note that individual participation in public protests is also influenced by a sense of connection to the evolving discourse within these information networks.*

Keyword:

*Reformasi Dikorupsi,
Social Media, Protests,
Demonstrations*

Article Info

Received : 06 Mar 2025

Accepted : 17 Apr 2025

Published : 05 Jun 2025

1. Pendahuluan

Sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2021 terjadi serangkaian aksi protes terhadap upaya pembentukan berbagai peraturan baru oleh parlemen. Berbagai peraturan baru ini dianggap merugikan kepentingan masyarakat dan cenderung berpihak kepada golongan elit. Aksi protes ini terjadi di banyak tempat di Indonesia dan menasar pada gedung parlemen setempat. Di Jakarta, pusat aksi protes terjadi di sekitar Gedung DPR/MPR dan juga sekitar Istana Presiden. Ribuan orang dari berbagai elemen turut hadir dalam aksi protes ini, mulai dari mahasiswa, kelompok buruh, organisasi lingkungan, sampai dengan murid Sekolah Menengah Atas atau sederajat. Aksi protes besar ini lebih dikenal dengan tajuk #ReformasiDikorupsi.

Aksi protes ini dimulai sekitar bulan September 2019. Berbagai elemen masyarakat turun ke jalan untuk melakukan aksi protes terkait dengan upaya pembentukan berbagai peraturan oleh parlemen. Berbagai peraturan tersebut menasar hampir seluruh sektor dalam masyarakat,

mulai dari ketenagakerjaan, lingkungan hidup, energi, sistem pemerintahan, dan sebagainya. Luasnya cakupan dari berbagai peraturan yang hendak dibuat ini menjadikan aspirasi dari masyarakat bersatu dan mengarahkan semua tuntutan mereka kepada para anggota parlemen yang hendak membahas berbagai peraturan tersebut.

Salah satu hal yang menarik dalam aksi protes ini adalah bagaimana sosial media memainkan peran dalam pembentukan aksi protes ini. Tanda pagar (#) pada tajuk demonstrasi ini adalah simbol yang begitu lekat dengan sosial media. Penggunaan tanda pagar sebagai tajuk dalam aksi protes langsung muncul tentu sejak adanya sosial media yang mempopulerkan penggunaan tanda pagar, biasa disebut sebagai hashtag, untuk kebutuhan tertentu. Hal menarik dari aksi yang biasa dikenal dengan tajuk bermula dari tanda pagar ini adalah kemampuan untuk menghubungkan antara apa yang terjadi di luring dan daring lalu saling berhubungan diantara keduanya sehingga batasan antara aktivisme luring dan daring cenderung kabur atau berkelindan satu sama lain.

Kajian mengenai hubungan antara gerakan sosial dan sosial media belakangan berkembang cukup pesat. Dua kutub utama dalam berbagai penelitian tersebut memberikan wawasan yang sangat berarti dalam bidang kajian ini. Argumen pertama cenderung mempertanyakan efektivitas gerakan sosial di sosial media. Banyak yang menyebutnya sebagai *slacktivism* sehingga memiliki spektrum berbeda dengan aktivisme. Kemudian dalam pandangan kedua beranggapan bahwa pemanfaatan sosial media oleh gerakan sosial tidak menghilangkan aktivisme, melainkan cenderung mempercepat proses koordinasi dalam upaya penyebaran informasi atau agenda dari aktivisme itu sendiri.

Istilah *slacktivism* untuk menekankan gerakan sosial pada sosial media menjadi cukup populer karena muncul dari komentar Malcolm Gladwell pada esainya dalam media New Yorker (2010). Argumen utama yang menjadi perhatian Gladwell adalah mempertanyakan efektivitas gerakan yang ada di sosial media pada dunia nyata. Pada titik ini Gladwell memandang bahwa apa yang terjadi di sosial media tidak selalu beresonansi dengan apa yang terjadi pada kehidupan di luar sosial media. Kemudian pandangan kritis akan efektivitas ini mengarah pada keraguan dari gerakan sosial berbasis sosial media ini memiliki daya transformatif. Seperti misalnya pandangan oleh Zahouri et al (2020) yang mempertanyakan seberapa jauh aktivisme berbasis digital atau sosial media dapat memproduksi perubahan lebih substansial.

Pengaruh dari pertanyaan mengenai efektivitas ini juga menyorot pada bentuk partisipasi dalam aktivisme dalam sosial media. Anggapan bahwa *slacktivism* adalah bentuk aktivisme yang malas (Smith et al, 2019) seringkali dilekatkan. Anggapan ini utamanya berasal dari proses seseorang untuk kemudian dapat dikatakan berpartisipasi pada suatu gerakan sosial dengan mudah karena hanya membutuhkan *click* pada gawai ataupun perangkat lain yang terhubung dengan internet. Sebagai konsekuensi, kemudahan ini kemudian membatasi partisipasi yang lebih besar dari seseorang untuk terlibat ataupun hadir secara langsung dalam gerakan sosial (Harlow & Guo, 2014), misalnya menghadiri aksi protes.

Efektivitas dari gerakan berbasis sosial media pada upaya untuk mencapai perubahan transformatif menjadi topik yang cukup hangat untuk diperbincangkan. Ada pandangan yang menganggap bahwa gerakan berbasis sosial media atau yang memanfaatkan sosial media ini juga memiliki kekuatan politik cukup potensial dalam mendorong perubahan transformatif. Argumen ini disampaikan oleh Clay Shirky (2011) yang membawa perdebatan ini untuk merefleksikan bahwa kekuatan politik tersebut berada pada kebebasan bersuara oleh seseorang di ruang publik melalui perantara teknologi. Bagi Shirky, banyak gerakan sosial yang memanfaatkan sosial media, terlepas itu berhasil atau tidak, menjadi blok kekuatan yang besar dan terkonfirmasi pada adanya respon dari negara (atau kekuasaan) atas gerakan-gerakan tersebut.

Pandangan berbeda beranggapan bahwa sosial media dan gerakan sosial memiliki hubungan yang tidak selalu harus menitikberatkan pada efektivitasnya, namun pada proses bagaimana gerakan sosial berbasis sosial media memberi pengaruh pada keputusan seseorang untuk melibatkan diri pada gerakan sosial. Studi yang dilakukan Yessenbekova mengkonfirmasi ini bahwa korelasi antara orang-orang aktif dalam membagikan konten di sosial media berkaitan dengan aktivisme juga cenderung terlibat dalam kegiatan kampanye di luar media sosial (Yessenbekova, 2020). Ardianto (2018) dalam penelitiannya juga melihat adanya pengaruh dari sosial media dalam proses pembentukan kelompok untuk menantang narasi yang sedang berkembang. Pembentukan kelompok ini bagi Ardianto terlihat dari proses ulang-alik dari yang terjadi di dalam dan luar sosial media sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terlepas satu sama lainnya.

Sosial media sebagai medium komunikasi kemudian dapat terlihat memiliki peran sebagai katalis untuk gerakan sosial sebagaimana adanya pengaruh dalam keputusan seseorang. Salah satu argument ini datang dari Anita Breuer *et al* (2013) yang mengacu pada peran sosial media pada gerakan revolusi di Tunisia. Selain itu, beberapa argumen yang mendukung ini juga datang dari para peneliti yang melakukan kajian pada gerakan revolusi Mesir di tahun 2011 (Schapals, 2019). Pada lingkup yang lebih kecil, Kumar dan Thapa (2015) juga menunjukkan hasil penelitiannya mengenai potensi peran dari sosial media dalam mendorong gerakan sosial di India. Peran dari sosial media sebagai katalis dalam gerakan sosial ini kemudian menjadi sangat jelas ketika memahami bagaimana konteks lansekap penyebaran yang cenderung didominasi oleh kelompok tertentu serta penguasaan infrastruktur media sehingga sosial media menjadi wadah untuk sirkulasi narasi tandingan. Selain itu, sifat sosial media yang cenderung terbuka dengan interaksi antar penggunanya memungkinkan perannya sebagai katalis karena adanya *emotional mobilization* yang terkandung didalamnya (Breuer et al, 2014).

Artikel ini membahas bagaimana peran sosial media melalui fitur dan elemen yang terkandung didalamnya mampu mempercepat proses konsolidasi massa untuk dapat berpartisipasi pada aksi protes secara langsung. Hubungan antara massa yang biasa dibahasakan sebagai publik dengan suatu gerakan sosial seringkali membutuhkan mediator untuk dapat saling terhubung. Kemudian gerakan sosial juga bukan menjadi entitas tunggal, melainkan ada kompleksitas jaringan didalamnya karena ada fragmentasi pada gerakan sosial itu sendiri. Misalnya ada gerakan lingkungan, gerakan buruh, gerakan tani, dan sebagainya. Seluruh entitas yang terlibat dalam sebuah gerakan membutuhkan konsolidasi sebelum terciptanya suatu gelombang protes yang besar.

Cakupan dari artikel ini utamanya membahas bagaimana gerakan #ReformasiDikorupsi dapat menggerakkan partisipasi dari publik melalui fitur dan elemen yang terkandung dalam sosial media serta konten didalamnya. Kelompok publik dalam artikel ini adalah orang-orang yang bukan memiliki latar aktivis. Latar belakang aktivis ini merupakan orang-orang yang tidak terafiliasi oleh organisasi masyarakat sipil ataupun pekerja sector non-profit. Kebutuhan akan deskripsi latar belakang bukan aktivis ini menjadi penting untuk melihat bagaimana diskursus yang berangkat dari kelompok gerakan sosial dapat melibatkan publik terutama dalam mobilisasi aksi protes yang besar.

2. Metode

Metode pengumpulan data untuk artikel ini dilakukan dengan menggunakan etnografi digital. Penggunaan metode ini berangkat dari upaya memahami lebih dalam satu topik yang melibatkan komunikasi antar manusia dengan perantara perangkat digital (Coleman, 2010). Salah satu produk dari digital media itu tidak lain adalah sosial media yang banyak digunakan

oleh individu untuk berkomunikasi baik dengan orang yang sudah dikenal sebelumnya maupun orang asing yang baru ia temui ketika terhubung dengan pelantar tersebut.

Perkembangan teknologi yang kemudian menyediakan domain *virtual* sejak tahun 1990-an tentu tidak luput dari perhatian ilmuwan sosial. Hal ini karena adanya bentuk-bentuk interaksi antar entitas didalam domain tersebut. Untuk menangkap dan memahami lebih dalam fenomena yang terjadi, para ilmuwan tentu saja membutuhkan suatu perangkat metodologi penelitian yang cukup efektif. Kebutuhan untuk seperangkat metodologi yang dapat digunakan dalam penelitian pada domain ini kemudian berangkat dari jenis-jenis metodologi yang sudah ada. Dalam perkembangannya, metodologi ini kemudian cenderung menginduk pada dua jenis data yang kemudian dihasilkan, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Sebagai salah satu metodologi dalam ilmu sosial, etnografi juga menjadi salah satu pilihan untuk dapat memahami apa yang terjadi pada ekosistem digital. Secara *natural* etnografi memberikan penekanan pada suatu wilayah tertutup dan cenderung membutuhkan proses imersi sebagai kekuatannya. Meski pada awalnya etnografi digital cenderung dibangun untuk memberikan perbedaan antara kehidupan daring dan luring (Hampton, 2017;169), metode ini belakangan cukup populer untuk memahami bagaimana hubungan antara individu dengan atau dalam ekosistem digital. Hal ini karena etnografi belakangan dapat menawarkan suatu penjelasan dimana perbedaan antara kehidupan luring dan daring saling berkelindan satu sama lain.

Hampton (2017) memberikan gambaran ragam metodologi yang mungkin digunakan untuk memahami fenomena digital. Etnografi menjadi salah satu metode yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif digital. Dibawahnya, ada peneliti yang menggunakan istilah *cyber-ethnography*, *netnography*, atau *virtual ethnography*. Diantara semua itu, penggunaan etnografi kemudian menjadi sesuatu yang melekat karena kekuatan observasi dan mengaitkannya dengan konteks, baik itu di dalam jaringan maupun luar jaringan, adalah suatu ciri khas dari metode ini.

Kenyataan bahwa keterkaitan antara individu dengan sosial media tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya sehingga dibutuhkan suatu kerangka metodologi yang cukup komprehensif untuk dapat memberikan pemahaman secara utuh terkait satu fenomena. Atas dasar ini, proses pengumpulan data untuk penulisan artikel ini tidak dapat memisahkan apa yang terjadi di dalam jaringan dan diluar jaringan sehingga sumber data primer didapatkan melalui pengumpulan data di sosial media serta wawancara mendalam dengan orang-orang yang terlibat dalam aksi protes #ReformasiDikorupsi.

Proses awal penulisan artikel ini adalah melakukan pengumpulan data dari pelantar sosial media. Peneliti memfokuskan penelusuran informasi terkait dengan aksi #ReformasiDikorupsi utamanya melalui pelantar X (sebelumnya bernama *Twitter*). Dibandingkan dengan pelantar lain, X cenderung memiliki fitur yang lebih jelas bagi peneliti untuk dapat menelusuri suatu topik dengan indikator popularitas tertentu. Indikator popularitas ini sangat jelas karena pemilik pelantar sudah menyematkan opsi untuk menunjukkan konten apa yang hendak dimunculkan dalam pencarian. Opsi ini mencakup konten paling populer atau konten paling baru. Dalam konteks artikel ini, peneliti melakukan pengumpulan data dan memilahnya berdasarkan popularitas dengan menggunakan kata kunci Reformasi Dikorupsi dan #ReformasiDikorupsi.

Penelusuran berbasis kata kunci di sosial media membutuhkan detail penulisan yang cukup ketat. Perbedaan antara jumlah kata dengan menyertakan spasi atau tidak juga turut mempengaruhi hasil pencarian pada pelantar tersebut. Proses penelusuran pada pelantar X juga menjadi lebih terstruktur karena kemampuan pencarian yang memperbolehkan pembatasan-pembatasan pada hasil pencarian sehingga mendapatkan hasil dengan baik. Dalam konteks artikel ini, penelusuran dibatasi dengan rentang waktu mulai dari bulan September 2019 sampai

dengan Oktober 2020. Periode ini diambil karena gelombang protes yang cukup massif berada pada rentang waktu ini.

Penelusuran kata kunci ini menjadi gerbang awal untuk penelusuran selanjutnya. Hasil yang tersaji dari kata kunci ini kemudian mengarahkan peneliti untuk melakukan penelusuran lebih lanjut, mulai dari memberikan perhatian pada akun-akun tertentu sampai dengan pengambilan fokus pada konten tertentu. Setelah melakukan penelusuran pada pelantar sosial media, peneliti kemudian mengambil beberapa sampel yang sesuai dengan fokus dalam artikelnya. Adanya konten yang berisi seruan disertai *hashtag* dan gambar merupakan konten-konten yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai bahan analisis terkait dengan topik pada artikel ini.

Batasan pengumpulan data untuk penulisan artikel ini adalah kemampuan peneliti dalam mengumpulkan data kuantitatif terkait dengan isu yang menjadi fokus tulisan. Batasan ini menjadi penting untuk disampaikan sebab beberapa analisis yang menggunakan data percakapan pada sosial media seringkali menggunakan besaran kuantitatif untuk dapat memberikan gambaran seberapa besar percakapan yang terjadi. Sebaliknya, fokus pada analisis kualitatif memberikan nuansa pada implikasi dari suatu percakapan. Bahwa suatu unggahan sangat mungkin memiliki pengaruh tidak hanya kaitannya pada satu percakapan, tetapi memiliki kekuatan melebihi percakapan itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk dapat memberikan gambaran bahwa semakin pudarnya batasan antara aktivisme digital dan non-digital, jika memang dapat dikatakan seperti demikian.

Selanjutnya adalah pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara kepada partisipan. Ada dua orang partisipan yang menjadi sumber informasi utama dalam penulisan artikel ini. Keduanya tidak memiliki latar belakang aktivis, bukan bekerja pada sektor *non-profit* ataupun terafiliasi dengan organisasi masyarakat sipil. Kedua partisipan ini juga terlibat pada aksi protes #ReformasiDikorupsi pada bulan September 2019. Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara daring. Meskipun demikian, peneliti kemudian tidak hanya membatasi komunikasi pada satu kali proses wawancara namun secara simultan membangun hubungan dengan partisipan melalui perantara alat komunikasi seperti melalui pesan singkat.

Penggunaan wawancara mendalam dilakukan untuk memahami detail proses yang menjadi landasan argumen dalam artikel ini. Pemilihan metode ini juga dilandasi untuk menggali penjelasan secara lebih detail akan suatu fenomena atau keputusan. Pendekatan dalam proses wawancara menggunakan *life history* pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Hal ini dilakukan untuk memahami lebih dalam atas latar belakang keterlibatan partisipan dalam gerakan sosial. Selain itu, pendekatan ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan dari pengalaman pada masa lampau dengan situasi saat partisipan memutuskan untuk terlibat dalam aksi protes #ReformasiDikorupsi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kronologi Kemunculan Gelombang Protes

Gelombang aksi demonstrasi #ReformasiDikorupsi bermula saat adanya agenda legislasi oleh para anggota DPR untuk Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tempo, 2024). Kemudian ada beberapa peraturan lain yang juga hendak dibahas oleh parlemen pada saat yang sama. Berbagai pembahasan peraturan-peraturan tersebut dianggap bermasalah oleh publik karena cenderung tidak sesuai dengan cita-cita gerakan reformasi tahun 1998 (Wahyuningroem *et al*, 2024). Landasan ini yang kemudian melahirkan gerakan massa yang dikenal dengan #ReformasiDikorupsi.

Eskalasi gerakan massa mulai terlihat pada awal September 2019. Segera setelah Presiden Joko Widodo terpilih untuk kedua kalinya, ia kemudian merestui rencana Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Dukungan ini secara resmi diberikan Presiden Joko Widodo dengan menandatangani Surat Presiden sebagaimana rilis yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara pada saat itu, yaitu Pratikno. Pernyataan ini disampaikan oleh Pratikno pada tanggal 11 September 2019. Respon publik terhadap dukungan Presiden Joko Widodo untuk melakukan Revisi Undang-Undang KPK ini cenderung negatif. Berbagai elemen organisasi masyarakat sipil banyak yang menyatakan kekecewaannya atas apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kekecewaan dan respon penolakan atas upaya Revisi Undang-Undang KPK ini juga datang dari kelompok akademisi dimana secara resmi Forum Guru Besar dari berbagai Universitas turut memberikan pernyataan sikapnya.

Rentetan peristiwa terkait dengan Revisi Undang-Undang KPK ini seketika menjadi perhatian publik saat salah satu akun yang secara aktif merangkai rangkaian peristiwa harian ini pada platform sosial media Twitter. Akun dari Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (@SINDIKASI_) sejak tanggal 13 September memberikan responnya atas dinamika yang terjadi tersebut dan dirangkai menjadi satu kompilasi yang diakhiri dengan unggahan poster berisi seruan untuk melakukan aksi demonstrasi pada tanggal 16 September 2019 di depan gedung DPR RI. Poster ini kemudian secara seragam juga diunggah oleh akun lainnya dari organisasi masyarakat sipil ataupun individu yang menolak upaya Revisi Undang-Undang KPK ini.



Gambar 1. Seruan untuk Melakukan Aksi Demonstrasi Kepada Publik oleh Akun Serikat Buruh
 Sumber: https://x.com/SINDIKASI_/status/1173120420121206785

Perhatian publik kemudian berkembang pada isu-isu lain yang juga sedang menjadi bahan pembahasan oleh anggota parlemen. Ajakan melakukan demonstrasi untuk menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual muncul satu hari setelah seruan terkait dengan Revisi Undang-Undang KPK. Adanya kesadaran atas pentingnya memberikan tekanan atas berbagai peraturan yang sedang dibahas ini kemudian memuncak

beberapa hari setelahnya.

Eskalasi dari kekecewaan publik atas berbagai isu yang berkembang memuncak pada tanggal 23 - 24 September 2019 dengan ribuan massa turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi. Aksi demonstrasi ini dilakukan di berbagai kota di Indonesia. Elemen massa juga berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, buruh, hingga kelompok tani. Berbagai isu tersebut kemudian terangkum menjadi 7 tuntutan. Ketujuh tuntutan tersebut antara lain: 1) Batalkan UU KPK dan sejumlah RUU bermasalah, 2) Batalkan Pimpinan KPK bermasalahan pilihan DPR, 3) Tolak TNI-Polri menempati jabatan sipil, 4) Stop militerisme di Papua dan daerah lain, 5) Hentikan kriminalisasi aktivis, 6) Hentikan pembakaran hutan di Indonesia, dan 7) Tuntaskan pelanggaran HAM dan adili penjahat HAM.

Di sosial media, setidaknya ada dua gelombang gerakan yang memiliki resonansi cukup besar. Pertama adalah #ReformasiDikorupsi dan kedua adalah #GejayanMemanggil. Dua gerakan ini tidak kemudian berseberangan satu sama lain. Agenda dan tuntutan yang diusung dalam kedua gerakan ini cenderung sama. Perbedaannya pada #GejayanMemanggil ini adalah basis lokasi dan upaya pembangkitan memori berbasis kejadian. Gerakan #GejayanMemanggil menyasar pada orang-orang yang berdomisili di Yogyakarta. Nama Gejayan digunakan untuk mengenang kembali aksi protes di Jalan Gejayan, Yogyakarta pada tahun 1998. Pada saat itu aksi demonstrasi memiliki tuntutan untuk menolak terpilihnya kembali Presiden Soeharto sebagai presiden. Aksi demonstrasi pada tahun 1998 tersebut berakhir ricuh karena terjadinya bentrok antara massa aksi dengan pihak yang mengamankan aksi tersebut. Kericuhan tersebut mengakibatkan ratusan massa aksi luka-luka dan satu orang mahasiswa tewas. Atas sejarah yang terjadi di Jalan Gejayan tersebut akhirnya nama #GejayanMemanggil diusung oleh kelompok massa yang hendak melakukan demonstrasi di Yogyakarta.

Di Jakarta, seruan untuk melakukan aksi demonstrasi berpusat untuk berkumpul di depan Gedung DPR/MPR. Sejak tanggal 22 September beberapa kelompok menggunakan poster ajakan terbuka untuk bergabung pada aksi demonstrasi tersebut. Poster ini diunggah oleh akun yang dikelola oleh kelompok organisasi mahasiswa, kelompok buruh, dan kelompok pemerhati media. Ajakan ini juga kemudian berisi berbagai persiapan yang perlu dilakukan, jargon-jargon penyemangat, sampai dengan menyentuh aspek gaya hidup.



Gambar 2. Seruan untuk Melakukan Demonstrasi yang Diunggah oleh Organisasi Non-Profit
Sumber: <https://x.com/remotivi/status/1176042191556243457>



Gambar 3. Seruan untuk Melakukan Aksi Demonstrasi yang Diunggah oleh Kelompok Organisasi Mahasiswa
 Sumber: https://x.com/BEM_FHUI/status/1176124902425821188



Gambar 4. Panduan Persiapan Sebelum Melakukan Demonstrasi yang Diunggah oleh Organisasi Buruh
 Sumber: https://x.com/SINDIKASI_/status/1176072145283309568

Masifnya penggunaan gambar yang diunggah untuk ajakan melakukan demonstrasi yang dapat ditemukan di sosial media menunjukkan bahwa gerakan sosial menyambut platform ini sebagai peluang untuk menyebarkan apa agenda mereka. Hal ini menarik bahwa unggahan ini dapat dikatakan sebagai ajakan untuk melakukan aksi demonstrasi bukan kemudian berisikan pesan atas tuntutanannya. Terbukanya sosial media sebagai platform dengan kurasi ada ditangan penggunanya pada tahap awal sebelum kemudian muncul untuk dapat dilihat pengguna lainnya, menjadikan sosial media dapat menjadi sarana penyebaran informasi yang lebih cepat dibandingkan dengan kanal penyebaran informasi lainnya.

3.2 Motivasi mengikuti demonstrasi

Muhammad mengingat keterlibatannya pada aksi demonstrasi pada bulan September 2019 dengan melihat *gallery* pada gawainya. Lalu ia kemudian melihat *history* pada unggahan *story* Instagram pada waktu demonstrasi tersebut. Ia sangat bersemangat saat menceritakan bagaimana suasana aksi demonstrasi yang menurutnya adalah pengalaman yang ingin ia lakukan kembali jika ada kesempatan dan perkembangan isu yang sesuai.

Semangatnya dalam bercerita ia tekankan karena ini menjadi pengalaman yang cukup berkesan baginya. Muhammad sendiri pada saat aksi tersebut berlangsung masih berkuliah di salah satu universitas negeri di wilayah Tangerang Selatan. Ia berkuliah di jurusan sosiologi. Selama kuliah sebelum mengikuti aksi demonstrasi tersebut, Muhammad tidak pernah sekalipun mengikuti aksi demonstrasi. Ia hanya mendengar cerita demonstrasi dari dosennya dan beberapa temannya yang aktif dalam organisasi mahasiswa dan sering melakukan demonstrasi ataupun aksi protes lainnya. Selama mendapatkan cerita tersebut, ia cenderung skeptis. *“Gue sih mikirnya waktu itu ngapain ikut demo nggak ada gunanya, gak bikin perubahan nyata apa-apa”*, jawab Muhammad ketika ditanya apakah ia pernah melakukan aksi demonstrasi sebelum ikut dalam aksi #ReformasiDikorupsi. Oleh karena itu ia memilih mengikuti kegiatan lain yang dianggapnya dapat memberikan manfaat langsung untuk mengatasi masalah sosial.

“Selain itu juga sebenarnya waktu jaman kuliah nggak ada isu yang serius banget. Perbandingan gue, dosen itu cerita bagaimana gentingnya waktu terjadi demonstrasi tahun 98. Jadi selama gue kuliah menurut gue isunya nggak ada yang segenting tahun 98 itu. Paling banyak demo anak kampus gue itu isunya lokal banget misalnya kayak tuntutan ke pihak kampus gitu. Jadi menurut gue masih belum urgent”, Muhammad memberikan gambaran latar belakang aksi demonstrasi yang ia dengar dan lihat pada saat ia kuliah.

Urgensi atas isu yang lebih besar menjadi salah satu alasan Muhammad mau bergabung secara sukarela dalam aksi demonstrasi #ReformasiDikorupsi. Saat itu ia merasa bahwa banyak kebijakan yang sedang dibuat memang cenderung akan merugikan rakyat. Perasaan dan gambaran akan kerugian yang akan dialami banyak orang langsung membuatnya teringat kondisi banyak orang di sekitarnya tinggal. *“Gue tinggal di tempat yang mana air aja tuh susah. Lo tau gak sih kalo ada cerita warga komplek sama warga kampung di Jakarta yang beda banget? Nah gue yang di kampungnya itu haha”*, Muhammad memberikan penjelasan darimana ia dapat memahami kesulitan yang dirasakan banyak orang.

Relevansi juga menjadi salah satu alasan Satwi untuk mengikuti aksi demonstrasi #ReformasiDikorupsi. Saat demonstrasi berlangsung, Satwi sedang menempuh studi pascasarjana pada jurusan komunikasi di salah satu universitas negeri di Jakarta. Ia datang bersama teman-teman semasa kuliah pada program sarjana di salah satu universitas negeri di Depok. Pada saat itu, teman-temannya sudah tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa. Mereka memutuskan untuk langsung berkumpul pada titik dimana aksi demonstrasi dipusatkan.

“Waktu itu kan gue mahasiswa, juga pekerja lepas. Peneliti freelance. Jadi ketika ada Omnibus Law yang itu banyak ngomongin soal ketenagakerjaan gue merasa itu mengancam pekerjaan gue. Itu kenapa mangkanya gue ikut”, Satwi bercerita alasan utama mengapa ia ikut aksi demonstrasi #reformasidikorupsi.

Secara latar belakang, Satwi cenderung berbeda dengan Muhammad. Perasaan untuk lebih sensitif dengan isu-isu sosial ia dapatkan melalui media. *“Waktu SMP gue diajak sepupu gue buat nonton film GIE, sejak itulah gue mulai penasaran dengan masalah-masalah sosial haha”*, tutur Satwi mengingat sejak kapan ia mulai tertarik dengan isu sosial. Ia menjelaskan bahwa latar belakang keluarganya tinggal di kawasan pusat Jakarta yang cukup baik sehingga sekelilingnya terkesan baik-baik saja. Baru ketika ia mulai menonton film GIE kepekaannya tentang isu sosial muncul. Sejak saat itu ia mulai mendalami isu sosial dengan memilih jurusan dan bidang pekerjaan yang banyak berkelindan dengan isu sosial.

Secara formal Satwi tidak pernah tergabung dalam organisasi gerakan sosial ataupun organisasi mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa. Organisasi mahasiswa yang ia ikuti selama menempuh pendidikan sarjana hanya Himpunan Mahasiswa Jurusan. Kepekaannya mengenai isu sosial cenderung banyak didapat dari perkuliahan serta pergaulannya di salah satu kedai kopi di sekitar Kemang, Jakarta Selatan. Setelah lulus, Satwi banyak bekerja sebagai peneliti dengan tema masyarakat adat dan sejak itulah ia semakin tertapar dengan berbagai isu sosial lebih dalam.

“Pertama kali nih gue turut aksi begini eh ternyata chaos banget hahaha”, kenang Satwi mengingat aksi demonstrasi #ReformasiDikorupsi yang ia ikuti. Semasa kuliah ia menceritakan bahwa banyak mahasiswa di fakultasnya yang melakukan aksi demonstrasi tetapi ia cenderung tidak mengikutinya karena ia menganggap isunya terlalu kecil dan memiliki dampak yang tidak terlalu krusial. Pandangannya tidak sepenuhnya skeptis namun ia memang merasa enggan untuk mengikuti aksi demonstrasi pada saat itu. Ia juga menekankan bahwa ia memang terlibat dalam banyak diskusi mengenai isu sosial, tetapi tidak ada dorongan untuk melakukan demonstrasi ketika ia kuliah pada jenjang sarjana.

Baik Satwi dan Muhammad menceritakan apa yang mereka rasakan pada saat demonstrasi berlangsung. Aksi demonstrasi tersebut berakhir dengan kisruh. Ada banyak bentrokan yang terjadi antara pihak pengamanan dengan massa aksi. Satwi dan Muhammad ada diantara kericuhan tersebut. Mereka terpisah dari teman-teman mereka dan mengandalkan naluri untuk mencari tempat aman. Segala situasi kericuhan tersebut memberikan suatu dorongan kepada mereka untuk keinginan terlibat dalam aksi demonstrasi lainnya. *“Setelah ikut demo itu gue jadi sadar emang kita perlu juga buat protes ikut demo gitu karna ada perubahan yang bisa ada lewat kebijakan”*, Muhammad memberikan pandangannya setelah mengikuti aksi protes #ReformasiDikorupsi.

Satu hal yang menjadi penting dalam melihat kembali motivasi yang diceritakan oleh Satwi dan Muhammad adalah mengenai perasaan terhubung dengan isu-isu pada gerakan #ReformasiDikorupsi ini. Perasaan terhubung yang kemudian dianggap sebagai kebenaran ini sebagaimana studi Molin & Schramm (2023) menunjukkan pemicu dari keterhubungan ini adalah perasaan. Studi yang dilakukan oleh Molin & Schramm pada pengguna sosial media biasa dan secara tidak sadar turut terlibat dalam gerakan ekstrem kanan memperlihatkan bahwa perasaan ketika melihat suatu konten ini adalah kunci besarnya dari gerakan ekstrem kanan hingga dapat menyentuh pengguna sosial media biasa.

Perasaan terhubung ini menjadi penting sebagai celah masuk dimana elemen lain memainkan peran penting untuk mempengaruhi Muhammad dan Satwi. Perasaan berbeda dengan emosi. Hal inilah yang kemudian menjadikan *truthmaking* semakin kompleks bukan hanya kemudian menjadi urusan penyerapan informasi lalu mencari pembandingan sehingga kebenaran tercipta. Perasaan terhubung ini kemudian melibatkan banyak variabel seperti pengalaman, emosi, dan berbagai stimulus psikologis yang boleh jadi menjauhkan penerima informasi untuk dapat mengolah kebenaran. Segera setelah perasaan terlibat dalam proses ini,

maka keputusan untuk berpartisipasi dalam suatu diskursus menjadi lebih mudah terutama ketika elemen emosi menjadi faktor yang selalu dipaparkan oleh suatu konten. Seperti yang kemudian akan saya tunjukkan dimana kemudian Satwi dan Muhammad turut berpartisipasi pada gerakan #ReformasiDikorupsi baik secara digital maupun turun ke jalan.

3.3 Merespon Gambar di Sosial Media

Satwi dan Muhammad adalah orang-orang tidak pernah ikut dengan kelompok ataupun organisasi gerakan sosial yang biasa melakukan aksi protes. Keduanya bahkan tidak tergabung dalam organisasi mahasiswa formal di kampusnya masing-masing meskipun saat itu mereka berstatus mahasiswa. Meski demikian, mereka tetap mengikuti isu-isu sosial melalui perkuliahan dan juga aktivitas diluar perkuliahan.

“Pas ada rame-ramenya di sosmed tuh, gue ngikutin juga. Gue dulu sebenarnya nggak ngikutin akun-akun organisasi sosial gitu. Yang gue ikutin tuh kayak akun jualan buku gitu. Nah dia tuh yang banyak kasih tau apa yang lagi rame soal ruu kuhp, omnibus law, dan sebagainya. Sampe akhirnya gue liat ada banyak postingan buat demo di DPR. Yaudah nggak pake lama gue ikut. Gue jalan sendiri itu terus janji sama temen gue bertiga di dekat DPR situ. Berangkatnya sih dari kampus tapi nggak bareng-bareng anak kampus gue”, Muhammad menceritakan detail bagaimana ia kemudian memutuskan untuk ikut dalam aksi #reformasidikorupsi.

Satwi memang sudah mengikuti beberapa akun organisasi gerakan sosial pada waktu itu, salah satunya adalah Sindikasi. *“Waktu itu kan udah rame tuh ada woro-woro buat aksi di DPR. Yang gue inget dari Sindikasi yang ngepost itu. Yaudah abis itu gue cari tau temen gue ada yang mau ikut apa enggak”,* cerita Satwi mengingat darimana informasi yang ia dapat sebelum mengikuti aksi demonstrasi. Satwi melihat unggahan dari Sindikasi di pelantar twitter. Pelantar ini juga yang menurut Satwi banyak mempengaruhi keputusannya untuk mengikuti demonstrasi karena banyak informasi untuk detail-detail aksi demonstrasi tersedia. *“Selain itu juga gue banyak retweet soal paramedis, bantuan hukum, atau jalur evakuasi yang banyak di share di twitter”,* cerita Satwi mengenai upaya untuk memberikan tambahan jangkauan selama masa protes #ReformasiDikorupsi ketika ia tidak dapat mengikuti rangkaian aksi demonstrasi setelahnya.

Muhammad mengikuti rangkaian aksi demonstrasi #ReformasiDikorupsi dua kali. Kali kedua ia ikut berselang satu tahun lebih dari aksi pertama. Pada keterlibatannya yang kedua kali ia tidak pikir panjang untuk mengikuti aksi demonstrasi tersebut. Adanya seruan untuk melakukan aksi demonstrasi yang kedua ini juga ia dapatkan dari sosial media. Ia kemudian menghubungi beberapa teman yang sebelumnya ikut aksi bersamanya. Namun pada aksi kali ini ia cenderung tidak banyak melakukan koordinasi dengan temannya dan hanya berbekal titik kumpul organisasi temannya. *“Sendiri gue waktu yang kedua itu, cuma tau oh mereka kumpul disini, dan akhirnya pun gue nggak ketemu sama temen gue itu hahaha”,* cerita Muhammad mengingat keterlibatannya pada aksi demonstrasi #ReformasiDikorupsi yang kedua. Ia juga sebenarnya tidak melakukan komunikasi langsung dengan teman yang mengunggah titik kumpul organisasinya tersebut, ia hanya melihat temannya tersebut mengunggah poster seruan aksi demonstrasi dari organisasinya. Selama aksi demonstrasi tersebut Muhammad juga turut mengambil gambar lalu diunggah di sosial media pribadinya sebagai bentuk keterlibatan pada percakapan digital.

Baik Muhammad dan juga Satwi terlihat merespon adanya seruan untuk mengikuti demonstrasi di sosial media dengan mengikuti seruan tersebut. Apa yang dilakukan oleh

keduanya setelah terpapar seruan tersebut kemudian mencari teman untuk dapat mengikuti aksi demonstrasi ini. Hal ini terutama ketika aksi demonstrasi ini menjadi yang pertama kali bagi mereka. Dalam rangkaian aksi protes #ReformasiDikorupsi, mereka cenderung tidak banyak mempertimbangkan keterlibatannya yang kedua kali dengan mencari rekan. Secara sukarela mereka bergerak dengan sendirinya sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi. Bagi Satwi yang tidak dapat terlibat langsung karena pekerjaan ia memilih untuk membagikan informasi penting sedangkan Muhammad tanpa pikir panjang langsung berkumpul ke lokasi dimana ia mendapatkan informasi.

Keyakinan dari Satwi dan Muhammad untuk turut mengikuti aksi demonstrasi terlihat begitu kuat dan hampir tidak ada hal yang menggoyahkan. Keduanya cenderung tidak banyak mempertanyakan kembali keputusannya sebelum mengikuti aksi demonstrasi. Identifikasi mengenai skala aksi yang akan terjadi sampai dengan proses pencarian rekan untuk turut ikut mengikuti aksi demonstrasi adalah proses yang melibatkan emosi dan berkelindan dengan berbagai pengalaman masa lalu. Meski tidak ada pelatihan ataupun pengalaman melakukan demonstrasi atau terlibat dalam demonstrasi besar, keyakinan keduanya tidak tergoyahkan.

3.4 Sosial Media dan Perannya untuk Mobilisasi

Perdebatan mengenai peran sosial media dalam kehidupan individu adalah tema yang banyak diperbincangkan oleh para pemerhati di topik ini. Pertanyaan yang seringkali muncul berkisar seperti apa relasi antara keduanya, apakah saling mendukung atau sebaliknya (Sirait, 2021). Salah satu peran penting dari sosial media dalam kehidupan antar individu adalah kemampuan untuk dapat memobilisasi massa. Kemampuan mobilisasi ini tidak hanya kemudian berkisar soal informasi, tetapi juga hal-hal lain didalamnya seperti pengalaman, perasaan atau emosi, dan penggambaran suasana yang sedang terjadi.

Cerita dari dua informan yang mengikuti aksi demonstrasi #ReformasiDikorupsi memberikan gambaran utuh mengenai hubungan dalam jaringan dan luar jaringan dalam mempengaruhi individu dalam berpartisipasi pada aksi protes. Relasi antara pengalaman yang dialami oleh individu dan wacana yang berkembang di sosial media dalam konteks ini terlihat menjadi sangat mendukung satu sama lain. Jika kemudian sosial media hanya mentransmisikan informasi tanpa ada variabel-variabel lain yang mengikuti, boleh jadi berbagai seruan untuk melakukan demonstrasi tidak akan mendapatkan banyak atensi dan mampu menggerakkan banyak orang untuk terlibat didalamnya.

Kemampuan unggahan yang ada di sosial media untuk menggerakkan individu tanpa pengalaman melakukan demonstrasi sebelumnya terletak pada kejelasan informasi yang tersedia. Tidak jarang berbagai informasi demonstrasi hanya tersiar pada lingkup tertentu meskipun sosial media menjadi ruang yang dianggap cukup terbuka untuk publik. Misalnya pada studi mengenai gerakan pemberontakan Mesir pada tahun 2011 dimana para aktivis sudah memanfaatkan sosial media untuk gerakannya namun sirkulasi informasi untuk mobilisasi protes publik terbatas pada grup Facebook (Clarke & Kocak, 2020). Apa yang kemudian terjadi pada #ReformasiDikorupsi cenderung bersifat responsif sehingga konsolidasi yang mungkin telah dilakukan oleh banyak organisasi gerakan sosial sebelumnya perlu segera untuk diketahui publik luas agar memberikan tekanan lebih kepada pemerintah.

Peran dari sosial media untuk mobilisasi menjadikannya fitur yang cukup unik. Studi jangka panjang yang dilakukan oleh Merlyna Lim (2024) dalam melihat hubungan antara sosial media dan politik menunjukkan bahwa pelantar sosial media menjadi kanal untuk memobilisasi suatu gagasan. Namun Lim juga memberikan batasan bahwa belum ada bukti bahwa sosial media dapat benar-benar memobilisasi atau memfasilitasi perubahan sosial yang sifatnya sistemik. Dalam kajiannya, Lim menunjukkan bahwa di Indonesia gerakan yang memiliki resonansi

dengan publik melalui sosial media cenderung berbasis isu sehingga cenderung belum sampai memicu perubahan sistemik.

Salah satu implikasi dari fitur-fitur yang ada dalam sosial media adalah menciptakan apa yang disebut sebagai *affordance*. Ini merupakan konsep relasional yang didefinisikan sebagai kemungkinan dan peluang yang muncul dari actor yang terlibat dengan suatu teknologi (Faraj & Azad, 2012:238). Sejak kemunculan sosial media, Lim mencatat bahwa pelantar ini menjadi kanal yang paling sering dimanfaatkan oleh para aktifis dan menawarkan bentuk alternatif dari partisipasi politik (Lim, 2024:39).

Relasi yang terjadi antara pengguna dan pelantar sosial media dibatasi oleh karakteristik dan fitur-fitur sosial media itu sendiri. Misalnya dalam pelantar X ada fitur *retweet* sementara di pelantar *Facebook* atau *Instagram* fitur tersebut tidak disediakan *by default* oleh penyedia pelantar. Dari perbedaan fitur ini kemudian pengguna harus menyesuaikan dengan karakteristik dari sosial media tersebut. Webb Keane menjelaskan bahwa konsep *afordance* ini seperti pemaknaan atas suatu obyek yang sangat bergantung pada konteks (Keane, 2014 & 2018). Misalnya seperti kursi yang tercipta dengan bentuk tertentu dan tentu ada kategori2 pengguna yang mungkin tidak dapat *fit* dengan bangku tersebut meski desainnya sudah dibuat sedemikian universal.

Keterlibatan Satwi dan Muhammad secara digital dalam gerakan #ReformasiDikorupsi patut kemudian dipahami sebagai keterlibatan yang dapat dilakukan oleh pengguna sosial media. Dalam keterlibatannya, Satwi dan Muhammad kemudian masuk ke dalam diskursus dari gerakan #ReformasiDikorupsi segera setelah keduanya berpartisipasi dengan mengunggah materi pada pelantar sosial media. Seperti Satwi yang ikut mengunggah foto pada pelantar Twitter atau Muhammad di pelantar Instagram. Menariknya bahwa respon dari Satwi dan Muhammad serta keterlibatannya dalam gerakan #ReformasiDikorupsi ini dilakukan berbarengan antara di ruang digital dan di luar jaringan. Kenyataan ini memberikan suatu gambaran bahwa ada persepsi bahwa gerakan #ReformasiDikorupsi dirasa tidak cukup untuk hanya berada dalam satu ruang tertentu, ini harus muncul di berbagai ruang. Memahami persepsi akan menjadi penting ketika menghubungkannya dengan emosi sehingga dapat memobilisasi orang-orang yang terlibat dalam gerakan #ReformasiDikorupsi ini.

Saya hendak kembali pada testimoni atas pengalaman mengikuti aksi demonstrasi oleh Satwi dan Muhammad untuk mencoba memahami lebih dalam praktik keduanya. Penekanan pada praktik ini kemudian tidak hanya terbatas pada keputusan untuk terlibat dalam aksi demonstrasi, tetapi juga pada keputusan untuk turut berpartisipasi dengan mengunggah konten pada sosial media. Konsep praktik emosional yang ditawarkan oleh Christoph Bareither (2019) dapat membantu untuk memahami ini. Salah satu argument penting dari Bareither adalah seseorang cenderung *membuat* pengalaman emosional dibanding hanya menunjukkan perasaan emosional. Ini juga menjelaskan mengapa Satwi dan Muhammad turut membagikan konten yang berkaitan dengan gerakan #ReformasiDikorupsi sebab ada kompleksitas emosi yang terangkum sehingga sulit untuk kemudian melakukan simplifikasi satu emosi tertentu, apakah itu sedih, senang, bangga, atau marah.

Elemen emosi adalah variabel yang menjadi paling penting untuk seorang pengguna menentukan apa yang harus dilakukan setelah melihat suatu unggahan. Hal ini yang juga menjadi khas sosial media dibandingkan dengan medium penyebar informasi lainnya. Karena itu, banyak pengamat mengatakan bahwa sosial media dapat menjebak penggunanya pada satu sirkuit informasi yang sebenarnya serupa sebagaimana konsep *echo-chamber*. Namun, keputusan untuk seorang pengguna memberikan respon pada suatu konten atau unggahan yang membuatnya secara tidak langsung memutuskan untuk terjebak pada suatu sirkuit informasi tertentu.

Variabel emosi ini menjadi penting sebagai penghubung antara interaksi luring dan daring. Ketika kita kembali mengingat bagaimana Satwi dan Muhammad saat memutuskan untuk terlibat secara aktif dalam percakapan terkait Reformasi Dikorupsi secara daring serta mengikuti aksi demonstrasi secara luring. Keduanya begitu terdorong untuk perasaan berpartisipasi dengan gerakan Reformasi Dikorupsi.

Emosi yang dirasakan oleh Satwi dan Muhammad tidak muncul dengan serta merta. Dalam cerita keduanya, mereka memberikan gambaran umum atas bagaimana ekosistem informasi di sosial media yang ada pada saat itu. Mereka menjelaskan bahwa informasi awal mengenai apa yang menjadi polemik sebelum kemudian memicu aksi demonstrasi #ReformasiDikorupsi didapatkan dari sosial media. Setelah informasi awal tersebut, semakin deras informasi terkait dengan polemik isu-isu yang banyak diangkat dalam gerakan #ReformasiDikorupsi muncul dalam sosial media mereka. Indikasi ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Lim dengan *affective binary framework* (2024:47) dimana konten dengan tema atau topik serupa pada sosial media beresonansi dengan afeksi penggunaannya sehingga ia cenderung melibatkan dan mempengaruhi afeksi pengkonsumsinya semakin dalam. Melalui kerangka afektif biner ini, seorang pengguna cenderung tidak terpapar dengan topik atau tema yang berada pada spectrum lain dari konten-konten tersebut.

Satu hal yang menjadi cukup penting dalam keputusan dari Muhammad dan Satwi untuk terlibat dalam aksi demonstrasi ini adalah perasaan menjadi relevan pada isu-isu yang sedang menjadi perhatian. Merujuk pada motivasi untuk ikut terlibat dan pengalaman masa lalu dalam membentuk sensitivitas pada masalah sosial, agaknya menjadi penting untuk melihat bahwa berbagai unggahan di sosial media selama periode protes #ReformasiDikorupsi memantik atau bahkan membangkitkan sisi afeksi dari kedua informan ini. Hal ini menunjukkan bahwa sosial media juga menjadi tempat dimana repons emosional dan pengalaman sensual dipraktikkan (Tchermalykh, 2022) sehingga berbagai unggahan di sosial media bukan hanya menjadi suatu pertukaran informasi semata.

4. Simpulan

Kembali pada fokus dari artikel ini untuk menjelaskan peran sosial media dalam aksi #ReformasiDikorupsi. Secara gamblang, sosial media memiliki peran sebagai katalis mobilisasi bagi agenda gerakan sosial. Adanya informasi yang secara detail dapat dilihat oleh banyak pengguna sosial media cenderung menjadi penentu utama bagaimana peran ini dapat dimiliki oleh sosial media. Sebaliknya, bagi gerakan sosial dapat dilihat bahwa peran sosial media ini adalah satu dari berbagai kanal yang mungkin dapat dipotimalisasikan sebagai katalis mobilisasi agenda-agenda gerakan sosial lainnya.

Adanya kemampuan sebagai katalis mobilisasi ini muncul dengan adanya elemen-elemen yang mampu mengakomodasi pengguna sosial media. Melihat kembali apa yang menjadi motivasi dan proses pengambilan keputusan dari seseorang yang belum pernah mengikuti aksi demonstrasi, ada tiga elemen penting yang mendukung peran ini. Elemen perasaan, *affordance*, dan praktik emosional saling berkaitan satu sama lain ketika menjelaskan bagaimana seseorang dapat berpartisipasi pada demonstrasi gerakan #ReformasiDikorupsi.

Peranan sebagai katalis mobilisasi yang ada pada sosial media dapat digambarkan melalui suatu mekanisme yang membutuhkan pemantik untuk mengaktifkannya. Adanya prakondisi dimana ekosistem informasi yang membuat seseorang terpapar sebuah diskursus menjadi elemen pembuka untuk dapat menjustifikasi perasaan terhubung dengan suatu wacana. Setelah seseorang memiliki perasaan terhubung dengan berbagai wacana, keterlibatan aktif melalui *affordance* yang terdapat pada fitur-fitur dalam pelantar sosial media dan praktik

emosional berkelindan satu sama lain dalam aksi demonstrasi seiring dengan kontribusi pada jejaring percakapan gerakan #ReformasiDikorupsi.

Artikel ini berupaya untuk memberikan suatu penyegaran dalam memahami gerakan sosial yang menempatkan kanal sosial media sebagai salah satu strateginya. Berbagai peluang analisis dalam bidang kajian ini sangat penting untuk tidak menitikberatkan pada hanya satu luaran, misalnya pada keputusan dalam percakapan daring atau motivasi untuk mengikuti aksi demonstrasi. Pada akhirnya apa yang hendak saya sampaikan pada tulisan ini adalah semakin sulitnya untuk hanya berfokus pada satu ruang atau kanal saja ketika persepsi terbentuk atas ragam informasi yang berasal dari bermacam sumber.

Referensi

- Ardhianto, Imam. (2018). Contemporary Islamic Movement, Popular Culture and Public Sphere in Indonesia: The #IndonesiaTanpaJIL Movement. *Archipel*. 95. 151-171. [10.4000/archipel.652](https://doi.org/10.4000/archipel.652).
- Bareither, C. (2019). Doing Emotion through Digital Media: An Ethnographic Perspective on Media Practices and Emotional Affordances. *Ethnologia Europaea*, 49(1), 7-23. Retrieved Mar 22, 2025, from <https://doi.org/10.16995/ee.822>
- Breuer, A., Landman, T., & Farquhar, D. (2014). Social Media and Protest Mobilization: Evidence From The Tunisian Revolution. *Democratization*, 22(4), 764–792. <https://doi.org/10.1080/13510347.2014.885505>
- Clarke K, Kocak K. (2020). Launching Revolution: Social Media and the Egyptian Uprising's First Movers. *British Journal of Political Science*. 2020;50(3):1025-1045. doi:10.1017/S0007123418000194
- Coleman, E. Gabriella. (2010). Ethnographic Approaches to Digital Media. *Annual Review of Anthropology* 39: 487-505.
- Faraj, S., and Azad, B. (2012). The Materiality of Technology: An Affordance Perspective. In M. Leonardi, B. A. Nardi, and J. Kallinikos (Eds.), *Materiality and Organizing: Social Interaction in A Technological World* (pp. 237–258). Oxford University Press.
- Gladwell, Malcolm. 2010 (4 October). 'Small Change: Why the Revolution Will not Be Tweeted.' *The New Yorker* 86(30):42–9.
- Hamanaka, S. (2020). The Role of Digital Media in The 2011 Egyptian Revolution. *Democratization*, 27(5), 777–796. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1737676>
- Hampton, Keith N., *Studying the Digital: Directions and Challenges for Digital Methods* (2017). *Annual Review of Sociology*, Vol. 43, pp. 167-188, 2017, <http://dx.doi.org/10.1146/annurev-soc-060116-053505>
- Harlow, S., & Guo, L. (2014). Will The Revolution Be Tweeted Or Facebooked? Using Digital Communication Tools in Immigrant Activism. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 19, 463–478. doi:10.1111/jcc4.12062
- <https://setneg.go.id/baca/index/presiden-jokowi-telah-tanda-tangani-surpres-usulan-revisi-u-u-kpk>
- <https://www.tempo.co/politik/mei-bulan-reformasi-kapan-reformasidikorupsi-mulai-muncul-apa-pencetusnya--59207>
- Karamat, A., & Farooq, A. (2016). Emerging Role of Social Media in Political Activism: Perceptions and Practices. *South Asian Studies*, 31, 381.
- Keane, W. (2014). Affordances and Reflexivity in Ethical Life: An ethnographic Stance. *Anthropological Theory*, 14(1), 3-26. <https://doi.org/10.1177/1463499614521721>
- Keane, W. (2018). Perspectives on Affordances, or The Anthropologically Real: The 2018 Daryll

- Forde Lecture. HAU: Journal of Ethnographic Theory, 8(1), 27–38.
- Kidd, D., and McIntosh, K. (2016) Social Media and Social Movements. *Sociology Compass*, 10: 785–794. doi: 10.1111/soc4.12399
- Kumar, R., & Thapa, D. (2015). Social Media as a Catalyst For Civil Society Movements in India: A Study in Dehradun City. *New Media & Society*, 17(8), 1299-1316. <https://doi.org/10.1177/1461444814523725>
- Lim, Merlyna (2024). *Social Media and Politics in Southeast Asia*. Cambridge University Press. United Kingdom.
- Madison, N., & Klang, M. (2020). The Case for Digital Activism: Refuting the Fallacies of Slacktivism. *Journal of Digital Social Research*, 2(2), 28-47. <https://doi.org/10.33621/jdsr.v2i2.25> (Original work published September 4, 2020)
- Nataliya, Tchernalykh. (2022). "We Felt That the Country Was in the Stage of a Rough Cut...": Vernacular Documentation, Political Affects and the Ideological Functions of Catharsis in Ukraine, *Visual Anthropology*, 35:2, 95-119, DOI: 10.1080/08949468.2022.2063670
- Piat, Chantal. (2019). Slacktivism: Not Simply a Means to an End, but a Legitimate Form of Civic Participation. *Canadian Journal of Family and Youth / Le Journal Canadien de Famille et de la Jeunesse*. 11. 162. 10.29173/cjfy29476.
- Sastramidjaja, Y., & Rasidi, P. P. (2021). The Hashtag Battle over Indonesia's Omnibus Law: From Digital Resistance to Cyber-Control. *ISEAS Perspective*, 2021(95). <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-95-the-hashtagbattle-over-indonesias-omnibus-law-from-digital-resistance-to-cyber-control-by-yatunsastramidjaja-and-pradipa-p-rasidi/>
- Schapals, Aljoshka Karim (2019) The Role of Social Media During The 2011 Egyptian Revolution: A Real Catalyst, or Merely A Facilitating Factor? In Bruns, A, McNair, B, & Schapals, A K (Eds.) *Digitizing Democracy*. Routledge, New York, pp. 163-171.
- Schramm, P. & Molin, J., (2023). Feeling the Truth: Emotions and Digital Truth-making within Right-wing Populist Networks on Twitter/X. *Ethnologia Europaea* 53(2), 1–20. doi: <https://doi.org/10.16995/ee.8922>
- Shirky, C. (2011). The Political Power of Social Media: Technology, the Public Sphere, and Political Change. *Foreign Affairs*, 90(1), 28–41. <http://www.jstor.org/stable/25800379>
- Sirait, Amelia Rugun (2021) "Spectatorial Sisterhood: Relasi Sosial Pengguna Second Account di Instagram," *Antropologi Indonesia: Vol. 42: Iss. 1, Article 8*. DOI: 10.7454/ai.v42i1.12417. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jai/vol42/iss1/8>
- Smith, B. G., Krishna, A., & Al-Sinan, R. (2019). Beyond Slacktivism: Examining the Entanglement between Social Media Engagement, Empowerment, and Participation in Activism. *International Journal of Strategic Communication*, 13(3), 182–196. <https://doi.org/10.1080/1553118X.2019.1621870>
- Wahyuningroem SL, Sirait R, Uljanatunnisa U and Heryadi D. (2024). Youth Political Participation and Digital Movement in Indonesia: The Case of #ReformasiDikorupsi and #TolakOmnibusLaw [version 3; peer review: 2 approved]. *F1000Research* 2024, 12:543 (<https://doi.org/10.12688/f1000research.122669.3>)
- Yessenbekova, U. M. (2020). Social Media and Slacktivism in Young People's Life. *Media Watch*, 11(3), 515-524. https://doi.org/10.15655/mw_2020_v11i3_202950
- Zohouri, Mostafa & Darvishi, Morteza & Sarfi, Majid. (2020). Slacktivism: A Critical Evaluation. 4. 173-188. 10.22059/JCSS.2020.93911.